

# PENGEMBANGAN AGRO-INDUSTRI PERDESAAN DENGAN PENDEKATAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)

## *Developing Agro-Industry in Rural Areas Using One Village One Product (Ovop) Approach*

Sahat M. Pasaribu

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

Naskah masuk : 7 Februari 2011

Naskah diterima : 18 Maret 2011

### ABSTRACT

Agro-industry development in rural areas could be implemented using an OVOP approach. As a people movement, this agro-industry needs active participation of all related institutions. The inter-related elements under the agribusiness system on this approach requests willingness of all related parties, from the upstream to the downstream of agricultural system cycle. The working steps for its application cover the selection of local specific product, identification of product strengths and associated constraints for development for higher quality and for global market, application of product development (processing and marketing) for added value and income improvement, and implementation of evaluation for better future product and business performances. The OVOP approach could be applied in rural areas of Indonesia if all stakeholders along with their respective institutions are in favor of the rural people's interest.

**Key words :** *agribusiness, global market, local product, partnership, rural development*

### ABSTRAK

Salah satu alternatif pengembangan agro-industri di perdesaan dapat dilakukan dengan pendekatan OVOP. Sebagai suatu gerakan masyarakat, pendekatan agro-industri ini membutuhkan partisipasi semua lembaga terkait. Hubungan yang saling mengkait antar elemen dalam sistem agribisnis pada pendekatan ini mengharapkan kesediaan semua pihak, dari hulu ke hilir dalam siklus sistem pertanian. Langkah-langkah operasional untuk pelaksanaannya mencakup pemilihan produk unggulan spesifik lokal, mengidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi jika akan mengembangkan produk tersebut hingga mampu meningkatkan kualitas dan menembus pasar global, melaksanakan kegiatan pengembangan (pengolahan dan pemasaran) untuk memperoleh nilai tambah dan meningkatkan pendapatan, dan melaksanakan evaluasi untuk meningkatkan kekuatan produk dan kinerja usaha. Pendekatan OVOP ini dapat dilaksanakan di Indonesia jika semua pemangku kepentingan bersama instansi masing-masing berpihak pada kepentingan masyarakat perdesaan.

**Kata kunci :** *agribisnis, kemitraan, pasar global, pembangunan perdesaan, produk lokal*

### PENDAHULUAN

Mata rantai pembangunan biasanya dimulai dengan adanya kebutuhan (*needs*) ketersediaan sumber daya (*resources*), dan keahlian (*skills*) yang didukung oleh kemampuan manajemen (*management*). Sementara perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dipandang sebagai bagian lain yang menyatu dalam mata rantai pemba-

ngunan itu sendiri. Pola pembangunan seperti ini merupakan siklus arah program yang terintegrasi dan terancang untuk menghasilkan suatu tujuan dan sasaran tertentu. Dalam konteks pembangunan, suatu rancangan pengembangan memerlukan data, informasi dan pengetahuan awal untuk menghasilkan rencana program yang baik dan tepat sasaran. Jika di berbagai negara, pembangunan perdesaan dimulai dengan memanfaatkan database (data dasar) yang mencakup data,

informasi dan pengetahuan awal untuk menyusun perencanaan pembangunan, maka di Indonesia ketersediaan data dan informasi yang akurat, terintegrasi dengan tingkat kepercayaan dan aksesibilitas yang tinggi diduga masih belum memadai. Kelemahan Indonesia menyediakan database seperti ini cukup menyulitkan perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan agro-industri/ industri berbasis pertanian di perdesaan.

Agro-industri di sini harus dilihat dalam perspektif sistem agribisnis yang memiliki keterkaitan usaha antar simpul-simpul pada sistem pertanian dan sistem ekonomi/bisnis yang membangunnya. Pengembangan agro-industri, dengan demikian, merupakan usaha peningkatan produksi atau hasil pertanian dalam berbagai macam produk yang bernilai ekonomi sehingga dapat memberikan nilai tambah yang dinikmati pelaku usahanya. Hal inilah yang dilakukan banyak negara berkembang untuk membantu bahkan mempercepat perkembangan industri berbasis pertanian di perdesaan. Mempelajari kesuksesan negara lain dalam pembangunan tidaklah salah dan keinginan mempelajari berbagai isu itu sebenarnya sudah tumbuh dan berkembang pada berbagai kalangan lembaga pemerintahan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya studi banding ke luar negeri oleh sejumlah pejabat negara. Terlepas dari tingkat kemanfaatan hasil studi banding tersebut, Indonesia perlu mempelajari lebih jauh tentang apa yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi kawasan perdesaan dengan perencanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan di lapangan.

Salah satu upaya pembangunan perdesaan yang saat ini sedang diperkenalkan di Indonesia adalah pendekatan *One Village One Product* (OVOP atau Satu Desa Satu Produk). Pendekatan ini merupakan gerakan masyarakat yang mengembangkan potensi yang dimiliki daerah secara terintegrasi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan rasa percaya diri serta kebanggaan akan kemampuan sendiri dan daerahnya. Sebagai suatu pendekatan pembangunan dari dalam (*endogenous development*) yang memanfaatkan sebesar-besarnya potensi wilayah sebagai modal dasar

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, maka masyarakat dari suatu daerah dapat mengembangkan kearifan lokal (*local wisdom*) setempat dan dengan mendorong berkembangnya "*semi-secondary industry*". Hal ini memberikan pengertian bahwa masyarakat mengolah dan memberikan nilai tambah (*added value*) kepada produk-produk primer yang dihasilkannya. Dengan pemahaman seperti ini, kekuatan ekonomi Indonesia yang selama ini banyak tersembunyi di perdesaan diharapkan dapat terangkat, diantaranya dengan mengembangkan agro-industri dengan pendekatan OVOP (Media Indonesia, 2009).

Pendekatan OVOP pertama kali diperkenalkan dan dimulai oleh masyarakat perdesaan di Oita Prefecture, Jepang pada tahun 1979. Gerakan masyarakat yang tumbuh dari diri sendiri ini telah sangat berhasil meningkatkan pendapatan per kapita mereka menjadi dua kali lipat dalam dua dekade. Keberhasilan tersebut kemudian menjadi contoh bagi sejumlah negara untuk mengembangkan potensi daerah dengan pola serupa. Salah satu negara yang sudah berhasil mengembangkannya adalah Thailand dan kemudian diharapkan juga di Indonesia.

Di Thailand, model pembangunan perdesaan yang tidak hanya terbatas pada produk berbasis pertanian ini sangat populer, disebut dengan istilah "*One Tambon One Product*" (OTOP) yang diperkenalkan pemerintah sejak tahun 2001 dan dilaksanakan sepenuhnya tahun 2002. Secara umum, keberhasilan program OTOP didasarkan atas keinginan kuat berbagai elemen masyarakat yang bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk memperoleh manfaat yang lebih baik. Walaupun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program OTOP sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah pengamat, namun secara keseluruhan program OTOP ini telah membantu banyak keluarga perdesaan dan telah mampu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Janchitfah, 2004; Ministry of Interior, 2004). Keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan program OTOP ini dapat dipelajari sebagai bahan yang sangat berharga untuk mengadaptasi atau menciptakan program sejenis di Indonesia.

Mempelajari pengalaman Thailand dinilai penting dan strategis untuk menciptakan berbagai terobosan dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Keterlibatan individu (*planners*) dan ketatalaksanaan lembaga pengelola (*governance*) serta prosedur pelaksanaan (*methods, rules and regulations*) dan batas kewenangan (*authority and jurisdiction boundary*) dipandang sebagai unsur-unsur utama yang peranannya sangat penting dalam suatu proses pembangunan.

Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman melaksanakan pembangunan pertanian yang mirip dengan pendekatan OVOP, yakni pendekatan dengan sistem kawasan. Kebijakan pembangunan kawasan yang mendorong kegiatan agro-industri dimaksudkan untuk mengaitkan berbagai elemen dalam sistem pertanian untuk menghasilkan produk tertentu yang bernilai ekonomi tinggi. Kegiatan yang dikenal dalam sistem agribisnis yang terintegrasi ini tidak berbeda jauh dengan pendekatan OVOP karena sama-sama mengharapkan terjadinya kegiatan lanjutan terhadap produksi pertanian untuk meraih nilai tambah dalam satu mata rantai berorientasi ekonomi. Namun demikian, pengalaman memperlihatkan bahwa pengembangan kawasan seperti program kawasan industri perkebunan (*kinbun*), kawasan hortikultura, kawasan peternakan, dan lain-lain bersama-sama dengan kawasan kelapa sawit, kawasan bawang merah, kawasan pisang dan sebagainya belum banyak memberikan kontribusi signifikan kepada para pelakunya. Hal ini diduga karena kurangnya sosialisasi kebijakan yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat, kemudian implementasi yang diduga belum memiliki manajemen pengawalan yang baik, dan inkonsistensi kesinambungan program dengan dukungan fasilitas yang memadai. Perlu dicatat bahwa pendekatan pembangunan sistem kawasan ini bahkan tidak masuk lagi sebagai salah satu strategi pembangunan perdesaan dan pertanian pada RPJM 2009-2014.

Tulisan ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru dalam pendekatan pembangunan kawasan. Memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di berbagai wilayah, pendekatan ini dinilai dapat memberikan dampak positif dalam upaya pe-

nggulungan kemiskinan. Jika mendapat sambutan dari para pemangku kepentingan, maka pendekatan OVOP ini akan mendorong percepatan pengembangan agro-industri di perdesaan Indonesia.

## **PENGALAMAN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN KONSEP PENDEKATAN OVOP**

### **Pendekatan Kawasan vs OVOP dalam Pembangunan Perdesaan**

Kementerian Pertanian telah memperkenalkan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan dengan pendekatan pengembangan kawasan. Sasaran langsung yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diperolehnya peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian, nilai tambah produk, dan pendapatan petani serta terbangunnya kawasan agribisnis terpadu oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu wadah kumpulan/lembaga tertentu. Pengembangan kelembagaan seperti ini merupakan dasar strategi pembangunan seluruh sektor, termasuk pengembangan kawasan berorientasi agribisnis (Soemarno, 2007). Sebagai strategi kebijakan pengembangan kawasan, maka pengembangan kelembagaan pada masyarakat harus mengarah pada kerjasama antar kelompok dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi. Demikian juga koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya di kawasan/wilayah yang bersangkutan. Dalam prakteknya, hasil penelitian Saptana *et al.* (2005) mengemukakan bahwa masalah kelembagaan masih merupakan kendala utama dalam pengembangan komoditas pertanian, khususnya dalam perencanaan dan pengintegrasian program/kegiatan. Pendekatan kawasan terintegrasi seperti ini pada dasarnya mirip dengan gerakan yang diperkenalkan pada pendekatan OVOP karena masing-masing mengandalkan sumber daya (alam, manusia dan kapital) daerah setempat dengan bahan baku dan kearifan lokal untuk menghasilkan produk spesifik bernilai ekonomi. Kedua pendekatan ini juga mengandalkan kehadiran pihak ketiga/perusahaan berbasis pertanian (menengah atau besar) yang lebih maju untuk membantu usaha secara teknis dan komersial. Dalam kaitan inilah pengem-

bangun kawasan identik dengan pengembangan dengan pendekatan OVOP.

Dalam pendekatan OVOP yang menonjol adalah terintegrasinya semua lembaga terkait, masing-masing dengan kapasitasnya kedalam suatu perencanaan terfokus. Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia, produk lokal yang dihasilkan dengan pendekatan OVOP harus didorong untuk mampu memberikan nilai tambah dengan bantuan teknis dan pemasaran yang memadai dari pihak ketiga (perusahaan penghela). Program OTOP Thailand melakukan banyak strategi terapan (*applied strategies*) untuk mendorong peningkatan usaha ekonomi, sehingga program dengan model ini perlu diadaptasi dalam pengembangan OVOP Indonesia. Diantara yang menonjol adalah kerjasama antar berbagai kalangan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi para pelaku usaha mengembangkan produk unggulan spesifik lokasi hingga mencapai kualitas tertentu yang mampu bersaing di pasar global. Pendekatan OVOP yang dilakukan secara berkelompok lebih memungkinkan terjadinya sinergi usaha yang saling mengisi/mendukung dan menguntungkan, seperti pengurangan biaya operasional usaha dan efisiensi kinerja. Meskipun dimungkinkan melakukan diversifikasi produk, hanya kelompok usaha dengan produk yang sejenis yang dapat dikembangkan dengan pendekatan OVOP ini karena alasan keseragaman penggunaan bahan baku, proses produksi dan segmen pasar.

Bagaimanapun komprehensifnya suatu pendekatan pembangunan, permasalahan akan selalu muncul karena hubungan dan pertautan antar elemennya tidak selalu cocok dan terintegrasi. Pengalaman Australia mengembangkan UKM di negaranya, misalnya, dihadapkan pada persoalan keahlian dan tingkat kapasitas tenaga kerja, bukan pada ketersediaan sumber daya manusia dan kapital (Harris, 2010), sementara Filipina dan Thailand tidak berbeda dengan Indonesia yang kesulitan menyediakan sumber daya kapital dan dukungan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah (Samar, 2010; Charnnarongkul, 2010).

Dalam pendekatan OVOP Indonesia, persoalan yang serius dan segera terlihat pada saat pelaksanaan di lapangan adalah terjadinya ketidak harmonisan hubungan antar

lembaga yang terlibat didalamnya. Besar kemungkinan situasi seperti ini akan terjadi pada tahun pertama pelaksanaannya. Pengalaman menunjukkan bahwa instansi/ lembaga di Indonesia memiliki ego sektoral yang tinggi yang mengakibatkan rendahnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan dengan sistem pembiayaan yang berlaku akan menyekat pembangunan itu sendiri. Sistem pembiayaan pembangunan saat ini, baik yang berasal dari APBN maupun APBD, diduga akan membatasi ruang gerak pendekatan OVOP dalam pengembangan agro-industri. Permasalahan seperti ini juga dialami oleh penyelenggara OTOP Thailand pada awal pelaksanaannya. Namun, dengan koordinasi pembangunan yang kuat dari pemerintahan pusat dengan pemecahan masalah yang cepat (*immediate resolution*), dampak negatif yang ditimbulkannya tidak terlalu membebani. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini adalah memperkuat sistem keorganisasian dengan manajemen dan pengawasan yang lugas dan ketat. Kondisi ini membuat organisasi OTOP Thailand memiliki tingkat resiliensi yang tinggi, baik secara teknis maupun dalam sistem keuangan / pembiayaannya. Pembenahan yang cepat dan penanganan permasalahan yang tuntas ditunjang oleh kelembagaan yang kuat dapat dipelajari dari keberhasilan pelaksanaan program OTOP Thailand membangun daerahnya.

### **Prinsip Dasar Pendekatan OVOP**

Di Indonesia, pendekatan OVOP mulai digagas pada tahun 2006 oleh Kementerian Perindustrian yang kemudian ditandai dengan terbitnya Inpres No. 6/2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dan Peraturan Menperin No. 78/M-Ind/Per/9/2007 tentang peningkatan efektivitas pengembangan IKM melalui pendekatan Satu Desa Satu Produk (OVOP) yang saling mengkait untuk mendorong produk lokal industri kecil dan menengah agar mampu bersaing di pasar global (Kementerian Perindustrian, 2011). Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM mengikutinya. Selama sekitar lima tahun ini, kegiatan ekonomi dengan pendekatan OVOP terkesan berjalan sendiri-sendiri oleh Kementerian Per-

industri dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, walaupun disebut-sebut terkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan di berbagai daerah. Diluar dugaan, Kementerian Pertanian tidak ikut mengambil bagian dalam pembangunan agro-industri dengan pendekatan OVOP, meskipun banyak dihasilkan produk industri kecil berbasis produksi pertanian. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian perlu mengambil kebijakan strategis dengan memasukkan pendekatan OVOP dalam pengembangan agro-industri di pedesaan. Konsep pelaksanaannya perlu secara serius disiapkan dengan menunjuk lembaga yang mengkoordinasikan secara internal maupun antar kementerian terkait. Untuk menyiapkan implementasinya, tiga prinsip dasar pendekatan OVOP harus dipahami dan diadopsi. Ketiga prinsip dasar tersebut mencakup pemilihan produk yang dihasilkan, pengukuran kekuatan sendiri, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia seperti diuraikan berikut (Kementerian Perindustrian, 2010a):

#### ***Produksi Lokal di Pasar Global (Local Yet Global)***

Mengupayakan pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk menghasilkan produk tertentu yang mampu mencapai reputasi global. Masing-masing daerah merevitalisasi potensi sumber daya dan memacu menghasilkan produk yang spesifik/unik, perpaduan antara potensi, kearifan dan budaya lokal, yang bernilai tambah tinggi, sesuai dengan standar pasar internasional, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Produk OVOP dapat dipasarkan secara internasional, namun tetap disukai di pasar lokal.

#### ***Kemandirian dan Kreativitas (Self Reliance and Creativity)***

Mengandalkan kekuatan masyarakat sendiri dalam gerakan OVOP. Usaha ini dilakukan secara mandiri dengan kreativitas, inovasi, ketekunan, dan potensi sumber daya, serta tingkat pengetahuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang menentukan produk mana yang dikembangkan karena memiliki kekhasan/keunikan lokal. Pemerintah mem-

berikan dukungan dan fasilitasi serta kemudahan agar potensi yang ada menjadi lebih baik, termasuk advokasi teknis, mediasi, pedoman teknis cara berproduksi yang baik, mengembangkan produk agar lebih menarik, menerapkan teknologi dan metoda baru, standardisasi, serta informasi investasi dan akses pemasaran.

#### ***Berorientasi Sumber Daya Manusia (Human Resource Development)***

Pengembangan SDM dilakukan agar mempunyai motivasi tinggi untuk mentransformasikan tantangan menjadi peluang pada berbagai bidang dan sektor (pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta bidang-bidang lainnya yang potensial dari daerahnya). SDM yang mapan tidak akan pernah menyerah dalam pencarian dan penggalan inovasi baru, serta dengan ketekunannya tidak pernah putus asa karena kegagalan, dan dengan resiliensi yang dimiliki selalu siap menghadapi tantangan.

Dengan prinsip diatas, maka pendekatan OVOP adalah suatu pendekatan pengembangan daerah secara terintegrasi yang dengan gerakan bersama menghasilkan satu produk berkelas global yang unik/khas daerah dan dengan kearifan lokal memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang tersedia. Satu desa sebagaimana dimaksud diatas dapat diperluas mencakup wilayah administratif lainnya, seperti kecamatan, kabupaten/kota maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha ekonomis. Penyebutan wilayah administratif di sini dimaksudkan untuk membedakan lokasi dan tanggungjawab kelembagaan pemerintahan yang terlibat.

#### ***Sasaran dan Langkah-langkah Operasional***

Tidak lengkap jika suatu pendekatan pembangunan pertanian tidak diberikan sasaran yang dapat dicapai. Kebijakan pengembangan agro-industri harus diimbangi oleh kekuatan pembinaan oleh para pemangku kepentingan di daerah. Dengan demikian, pengembangan agro-industri tersebut menjadi selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi daerah. Dalam kaitan ini, maka secara umum, sasaran pembangunan pedesaan berbasis pertanian dengan pendekatan OVOP setidaknya

nya dapat dirinci berikut: (a) Terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat setempat; (b) Menguatnya kemampuan kemandirian masyarakat dalam pembangunan ekonomi wilayah; (c) Berkembangnya kearifan lokal/pengetahuan tradisional sebagai potensi sumber daya lokal yang dimiliki secara turun-temurun dan menjadi keunggulan SDM setempat; (d) Berkembangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat umum dengan karakteristik tertentu; (e) Berkembangnya motivasi dan kreativitas serta inovasi masyarakat dengan keunikan produk yang berciri khas lokal; dan (f) Berkembangnya kemampuan masyarakat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan standar hidup pada berbagai tingkatan ekonomi.

Secara khusus, sasaran pembangunan agro-industri di perdesaan Indonesia dengan pendekatan OVOP memungkinkan: (a) Terdongnya pertumbuhan industri perdesaan yang mandiri; (b) Dimungkannya kegiatan agro-industri sebagai motor penggerak pengembangan perekonomian daerah dan nasional; (c) Meningkatnya kemampuan pemasaran dan daya saing produk berbasis pertanian menembus pasar global dan sesuai dengan standar pasar internasional; (d) Meningkatkan peran agro-industri dalam penciptaan lapangan kerja; (e) Meningkatnya perolehan nilai tambah produk agro-industri untuk memperbaiki pendapatan masyarakat; dan (f) Semakin meratanya pembangunan di berbagai wilayah dengan kecenderungan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, langkah-langkah pengembangan agro-industri dengan pendekatan OVOP perlu diawali dengan mengenali potensi sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing, termasuk potensi sumber daya alam, manusia dan kapital yang dimiliki. Beberapa langkah operasional dalam konteks pendekatan OVOP ini dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Membangun kesadaran masyarakat lokal tentang potensi diri dan kekayaan sumber daya wilayah masing-masing; (b) Meningkatkan kearifan lokal dengan mencoba berbagai upaya produktif dengan semangat kebersamaan/gotong-royong sebagai suatu kekuatan; (c) Mengembangkan motivasi dan kreativitas masyarakat untuk meraih nilai tambah produk yang lebih besar dan dengan demikian

meningkatkan pendapatan masyarakat; (d) Memperbaiki strategi pemasaran dan jalur distribusi yang menguntungkan dalam penjualan produk lokal; (e) Memperkuat fasilitas pengembangan inovasi dan informasi teknologi sebagai sarana meningkatkan promosi produk-produk terbaik daerah; dan (f) Menyediakan fasilitas pengembangan sumber daya manusia masyarakat lokal.

Dengan langkah-langkah diatas, maka pembangunan agro-industri di perdesaan harus didorong kedalam suatu gerakan atau semangat yang mampu menghasilkan karya produksi yang khas dan unik yang memiliki keunggulan, bernilai dan berdaya saing tinggi serta dapat dijual dan mempunyai segmen pasar tersendiri. Untuk produk agro-industri, hal ini harus dimulai dengan perbaikan sistem komoditas (tanaman) dan penanganan pasca panen untuk memperoleh bahan baku yang baik, sehingga produk-produk olahan bermutu dapat meraih berbagai standar (level nasional dan internasional, seperti GMP dan HACCP) dan bersaing di pasar domestik dan global (Kustiari, 2010).

## **STRATEGI PENGEMBANGAN AGRO-INDUSTRI PERDESAAN**

Industri berbasis pertanian sangat berperan menggerakkan ekonomi rakyat. Kegiatan agro-industri tidak hanya menghasilkan barang jadi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pemasok bahan baku (input) bagi perusahaan menengah dan besar. Artinya, gerakan roda ekonomi agro-industri dengan skala usaha mikro dan kecil dapat mendorong berkembangnya usaha besar yang diharapkan dapat membuka peluang kesempatan kerja baru. Harus diakui bahwa pada saat ini pertumbuhan kesempatan kerja pada skala usaha menengah dan besar tidak selalu menunjukkan kecenderungan penyerapan tenaga kerja yang signifikan.

Walaupun terdengar sangat klasik beberapa pemikiran berikut ini perlu dipahami dalam konteks akselerasi pengembangan subsektor agro-industri skala mikro dan kecil: *Pertama*, adanya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang dibuktikan dengan diperkenalkannya program-program yang menggerakkan dunia usaha di tingkat per-

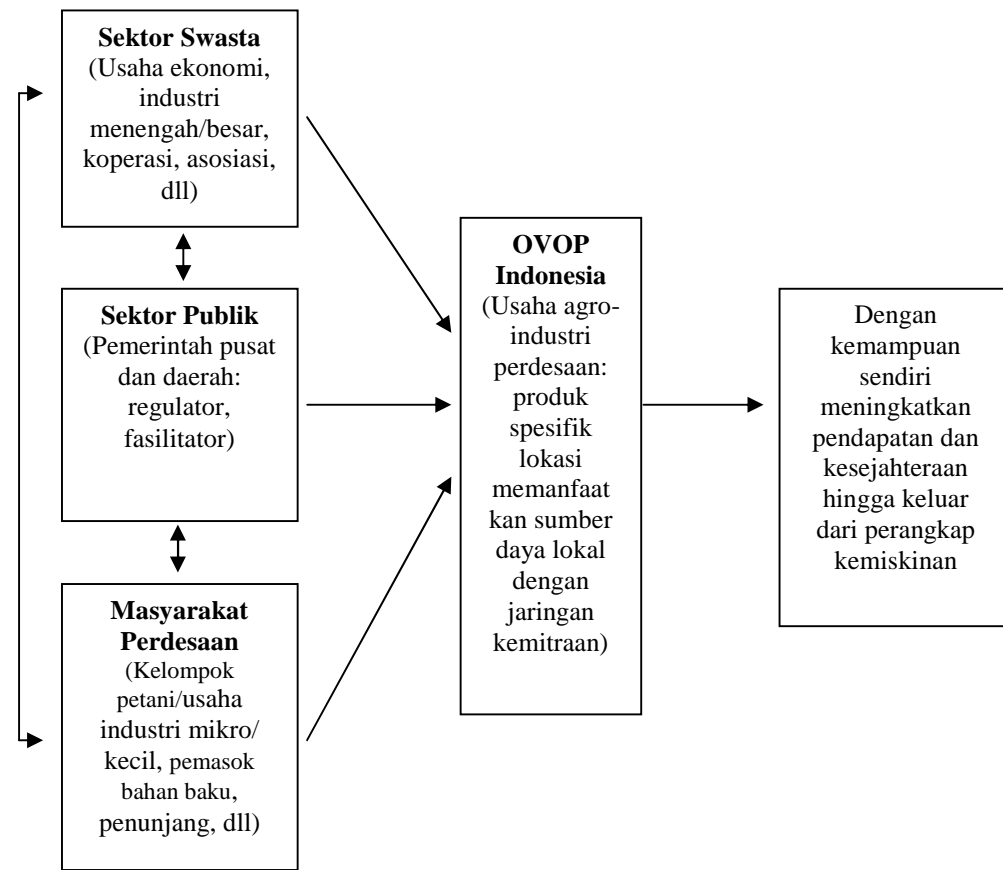
desaan. Hal ini didasarkan atas keinginan dan janji (*commitment*) pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan melakukan pembangunan berkelanjutan. Karena isu penting saat ini berhubungan dengan pengurangan jumlah orang miskin (khususnya di perdesaan), maka usaha-usaha yang berbasis masyarakat harus lebih ditonjolkan. *Kedua*, adanya konsistensi dan kesinambungan pembangunan wilayah dengan memerhatikan berbagai faktor dengan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) yang akan membantu menentukan arah pembangunan kedepan (*forward linkage*). Tata kelola pemerintahan secara desentralisasi dengan meningkatkan otoritas daerah perlu terus diperbaiki untuk memperkuat kemampuan daerah mengatasi berbagai persoalan lokal dan regional. Diantaranya adalah dengan memperkuat peran kelembagaan ekonomi setempat yang mampu memfasilitasi keinginan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Layak tidaknya keinginan tersebut akan diputuskan bersama-sama dengan rakyat. Artinya, partisipasi masyarakat perdesaan dalam pengambilan keputusan dan menentukan kegiatan ekonomi sangat diperlukan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Cara ini dinilai sangat layak untuk memberdayakan masyarakat pada level terbawah (*grassroot level*). *Ketiga*, tersedianya database dan informasi awal yang akurat tentang potensi wilayah dengan komoditas unggulan spesifik lokasi yang bersangkutan. Database ini mencakup banyak sektor dan bidang, meski tidak terlalu rinci tetapi seyogyanya dapat disajikan dalam format yang mudah dibaca/dipahami dan dapat diakses oleh siapa saja. Menurut Pongquan (2005), data tersebut akan sangat membantu peletakan dasar perencanaan, memperlancar komunikasi pusat dan daerah karena memiliki informasi yang sama, serta memudahkan identifikasi target tertentu untuk merumuskan skala prioritas pembangunan. Database ini dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha untuk menetapkan jenis dan tempat membuka investasi baru. Database dan informasi yang dibangunnya sangat perlu dalam penyusunan rencana dan strategi pelaksanaan berbagai kegiatan.

Strategi pelaksanaan pengembangan agro-industri di perdesaan perlu memerhatikan sejumlah inisiatif berikut untuk menebar

gerakan kolektif dan semangat kebersamaan: (a) Melakukan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat lokal; (b) Memanfaatkan pengetahuan, tenaga kerja dan sumber daya lokal; (c) Mengutamakan perbaikan mutu dan penampilan produk; (d) Meningkatkan promosi dan pemasaran secara aktif, baik pada tingkat nasional maupun global; serta (e) Diutamakan bagi usaha agro-industri yang menghasilkan produk terbaik dan yang kualitasnya dapat ditingkatkan serta akses pasarnya dapat diperluas.

Dalam konteks ini, motor penggerak pelaksanaan kegiatan pengembangan agro-industri di perdesaan mencakup tiga komponen kelembagaan, yakni: (a) Masyarakat lokal yang memanfaatkan kearifan lokal dan keahliannya untuk merancang, menciptakan, dan memproduksi serta mengembangkan produk lokal yang unik, bernilai tambah tinggi, dan mendapatkan pengakuan standar internasional; (b) Pemerintah pusat/pemerintah daerah yang bertugas mendukung, mendorong dan memfasilitasi kegiatan produksi melalui berbagai kebijakan, kegiatan penelitian, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan SDM serta kegiatan promosi/pemasaran; (c) Sektor swasta yang secara aktif berpartisipasi mendorong kegiatan sesuai bidang, fungsi dan kemampuannya dalam pengembangan sumber daya manusia, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Secara konseptual hubungan koordinatif kegiatan antara ketiga kelompok lembaga diatas dapat diilustrasikan dalam gambar dibawah ini yang menonjolkan kemitraan usaha dalam aplikasi pengembangan agro-industri. Representasi pemerintah (instansi/dinas terkait), perusahaan inti/lembaga penghela (diupayakan berasal dari usaha dengan kegiatan sejenis dan karakteristik tertentu), dan kelompok usaha (usaha mikro dan kecil sejenis, termasuk pemasok bahan baku) diharapkan dapat menciptakan usaha bersama yang baru dan saling menguntungkan. Ketiga lembaga yang saling berkoordinasi ini, secara teoritis akan memajukan usaha, dan secara praktis akan meningkatkan produksi dan produktivitas, membuka peluang pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan usaha (Pasaribu, 2008). Ini juga berarti bahwa pola kemitraan



Gambar 1. Skema Koordinasi Tiga-Jalur Pengembangan Agro-Industri Perdesaan

dalam pendekatan OVOP ini akan mampu menggerakkan ekonomi lokal, regional, bahkan nasional. Namun demikian, fasilitasi yang disediakan pemerintah harus ditunjukkan dengan berbagai investasi infrastruktur pendukung sebagai strategi pendorong kegiatan agro-industri di perdesaan (Norton, 2004; Kustiari, 2010).

Syarat utama terjalannya kemitraan adalah adanya kebutuhan bersama antara pihak-pihak yang bermitra. Industri besar memerlukan mitra kerja (usaha kecil), misalnya dalam menjamin pasokan bahan baku, pasokan produk setengah jadi atau barang jadi secara berkesinambungan, sementara usaha mikro dan usaha kecil (kelompok masyarakat) yang bersangkutan memerlukan jaminan pasar bagi produksinya. Saling ketergantungan atas produk yang dihasilkan ini akan membangun jaringan usaha bersama atau jaringan kemitraan yang dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas

(*ability and capacity*) masing-masing pihak. Mengenali kemampuan sendiri dan memahami keunggulan mitra usaha biasanya akan menghasilkan suatu pola jaringan kemitraan yang berkelanjutan. Kejujuran dan kepercayaan (untuk suatu kesepakatan) umumnya cukup dipahami oleh kalangan dunia usaha yang dalam penerapannya, kedua faktor tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan usaha. Usaha/industri besar dan kecil diatas dapat disebut sebagai pihak pertama dan kedua yang membangun kemitraan. Meskipun demikian, peranan pemerintah sebagai regulator dan sekaligus fasilitator tetap diperlukan untuk memperlancar dan menjamin kelangsungan usaha bersama tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat disebut sebagai pihak ketiga yang tergabung dan tidak terlepas didalam jaringan kemitraan ini. Konsep inilah yang disebut sebagai jaringan kemitraan dalam konsep pendekatan OVOP Indonesia dan dalam hal pengembangan agro-industri, pen-



dekatan ini mampu membangun hubungan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Sebagaimana deskripsi diatas, ketiga aktor pelaku yang membangun jaringan kemitraan membutuhkan beberapa tahapan pembentukan kerjasama. Pada tahap awal, adanya komunikasi antara dua pihak yang akan bermitra merupakan situasi kritis karena pada tahap ini keduanya akan saling menjelaskan keadaan usaha masing-masing dan diharapkan dapat segera memahami simpul-simpul usaha yang akan dikembangkan bersama. Kesepakatan-kesepakatan bisnis yang mengikat dan saling menguntungkan akan dilakukan pada tahap berikutnya. Di sini, transaksi nyata atas suatu kemitraan telah terjadi dengan menangkap peluang bisnis yang tersedia secara berkesinambungan. Tahap akhir proses pembentukan jaringan kemitraan ini adalah diciptakannya suatu keseimbangan hubungan antar pihak yang bermitra. Pemeliharaan hubungan harmonis yang diikat oleh berbagai kesepakatan bisnis akan melahirkan sinergi ekonomi yang menguntungkan kedua pihak dan sekaligus bermanfaat bagi sebagian masyarakat di sekitarnya (misalnya, karena dapat menampung sejumlah tenaga kerja baru atau membuka peluang usaha baru karena *multiplier effect* yang ditimbulkannya). Untuk suatu jaringan kemitraan yang berkelanjutan seperti ini sangat diperlukan adanya visi, tujuan, komunikasi, aksi, dan kesepakatan bersama (Kementerian Perindustrian, 2010b).

## RENCANA AKSI DAN IMPLEMENTASI

Untuk suatu rencana aksi pengembangan agro-industri dengan pendekatan OVOP, pemilihan produk unggulan lokal (*local specific commodity*) berbasis pertanian dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa kriteria, yakni: (i) merupakan produk khas lokal dan/atau produk kompetensi daerah; (ii) unik, memiliki keaslian dan becitra tradisi/budaya lokal; (iii) bermutu dan berpenampilan menarik/baik; (iv) berpotensi pasar domestik dan ekspor; dan (v) dapat diproduksi secara konsisten dan berkesinambungan. Selanjutnya, rencana aksi dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah seperti berikut:

## Penetapan Produk

Penetapan produk mencakup (i) usulan/inisiatif masyarakat dan merupakan produk unggulan atau spesifik/khas daerah yang mengusulkan; (ii) produk dilengkapi dengan informasi teknologi dalam proses produksi, kompetensi SDM yang menangani, ketersediaan bahan baku, dukungan institusi pembina, pasar yang sudah dicapai dan yang akan menjadi target serta berbagai permasalahan yang dihadapi termasuk masalah pengemasan, transportasi, infrastruktur dan pembiayaan; dan (iii) produk ditetapkan melalui forum diskusi kelompok, jika perlu didahului dengan survey dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

## Identifikasi dan Analisis Permasalahan yang Dihadapi

Identifikasi produk harus dibahas dalam suatu forum untuk mendapatkan kesepakatan semua pihak terkait. Sementara itu, analisis permasalahan perlu dilakukan secara mendalam untuk langkah pembinaan lebih lanjut. Untuk suatu konsistensi pengembangan agro-industri di perdesaan dibutuhkan rencana aksi logis yang dapat diimplementasikan dengan keterlibatan berbagai kalangan, kemudian menetapkan paket-paket pembinaan dengan prosedur dan mekanismenya, menunjuk instansi yang terlibat, menyediakan anggaran dan menyusun jadwal waktu pelaksanaan.

## Operasional Pembinaan

Pembinaan produk terpilih dilakukan secara fokus dan tuntas melalui fasilitator, pendampingan, supervisi tenaga ahli dengan dukungan yang kuat dan terpadu dari pemangku kepentingan. Pembinaan dalam bentuk bimbingan, bantuan dan pendampingan dilakukan pada bidang-bidang: (i) teknologi, standarisasi dan mutu produk; (ii) promosi dan pemasaran; (iii) pembiayaan/investasi; (iv) peningkatan SDM; dan (v) pengembangan *website*.

## Jenis-jenis Program Pembinaan dan Pengembangan

Beberapa jenis program pembinaan dan pengembangan agro-industri yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan, antara lain adalah (i) pengembangan dan penerapan

teknologi berproduksi; (ii) penerapan standar manajemen mutu nasional/internasional; (iii) pengembangan saluran promosi dan penjualan di pusat pembelanjaan, bandara, rumah sakit, hotel, dll; (iv) pameran dan *trade fair* tingkat internasional di dalam/di luar negeri; (v) fasilitasi akses pembiayaan, sosialisasi dengan lembaga perbankan dan nonbank; (vi) pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding di dalam atau di luar negeri; (vii) promosi melalui pengembangan *website* (IT); (viii) pengembangan bahan baku; (ix) pengembangan infrastruktur jalan aspal/listrik/air bersih pada sentra agro-industri; dan (x) pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan (agro-industri) secara berkesinambungan.

### Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembinaan dilaksanakan secara bertahap dan terpadu, sebagai upaya mengukur pencapaian pembangunan dengan semangat kebersamaan.

## PENUTUP

Pendekatan OVOP merupakan gerakan masyarakat yang mengandalkan kemampuan sendiri melakukan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lokal. Pendekatan OVOP dapat diaplikasikan diantaranya dengan: (a) menetapkan produk yang akan dikembangkan; (b) mengidentifikasi potensi pengembangan produk dan permasalahan terkait; (c) melakukan pembinaan dengan aplikasi teknologi pengolahan, peningkatan kualitas, perluasan pemasaran, dan peningkatan kemampuan SDM; dan (d) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan usaha. Memanfaatkan database yang tersedia, maka suatu perencanaan kegiatan ekonomi di perdesaan dapat disusun dengan lebih akurat dan hasil pelaksanaannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelakunya.

Pengalaman negara lain membangun industri perdesaan dengan pendekatan OVOP sangat berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pendekatan yang sama dapat diaplikasikan dalam pengembangan agro-industri di Indonesia dengan beberapa penyesuaian menurut potensi sumber daya yang tersedia. Koordinasi antara pemerintah, lembaga swasta dan petani/kelompok tani dalam bentuk kemitraan usaha dapat mendorong percepatan pengembangan usaha dalam skala ekonomi yang menguntungkan. Kementerian Pertanian perlu mengambil inisiatif kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan beserta pemerintah daerah untuk menghasilkan produk agro-industri spesifik lokasi di berbagai daerah dengan pendekatan OVOP.

Tidak semua program pembangunan agro-industri berhasil dengan memuaskan, termasuk program dengan pendekatan OVOP. Di satu pihak, keterbatasan faktor-faktor internal dalam berbagai bentuk, seperti peraturan perundangan, ketersediaan dana, kelemahan manajemen dan teknik berproduksi serta kurangnya fasilitas layanan merupakan faktor-faktor yang dapat mengganggu kelancaran usaha. Keterbatasan ini juga masih ditambah dengan lemahnya koordinasi antar instansi terkait, terutama dalam hal pembiayaan yang mengakibatkan tersekatnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun demikian, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program ini dapat ditanggulangi melalui berbagai perbaikan instrumen kebijakan. Sementara di lain pihak, faktor-faktor eksternal di luar jangkauan pengetahuan atau diluar kemampuan otoritas yang ada, seperti perubahan cuaca atau fluktuasi harga di pasar global merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan program pembangunan. Patut dipertimbangkan bahwa upaya peningkatan pengetahuan serta kemampuan menganalisis, beradaptasi dan merancang pendekatan yang lebih akurat diharapkan dapat mengendalikan faktor eksternalitas ini ke arah yang lebih diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Charnnarongkul, J. 2010. Community Enterprise: People Empowerment, Thailand Lesson Learn. *dalam* Rusastra I W., H. P. Saliem, S.H. Susilowati, R. N. Suhaeti. H. J. Purba, dan Wahida (Eds.): The Role of SMEs on Poor Power Empowerment: Lesson

- Learned and Sharing Experiences. Proceedings of a Workshop, Bali, Indonesia, October 28-30, 2009. APEC-ATCWG Agricultural Technical Cooperation Working Group Workshop (ATC 09/2009 A). ICASEPS. Bogor. pp. 153-178.
- Harris, D. 2010. The Role and Development of SMEs: Key Issues and Some Australian Perspectives. *dalam* Rusastra I W., H. P. Saliem, S.H. Susilowati, R. N. Suhaeti. H. J. Purba, dan Wahida (Eds.): The Role of SMEs on Poor Power Empowerment: Lesson Learned and Sharing Experiences. Proceedings of a Workshop, Bali, Indonesia, October 28-30, 2009. APEC-ATCWG Agricultural Technical Cooperation Working Group Workshop (ATC 09/2009 A). ICASEPS. Bogor. pp. 13-28.
- Janchitfah, S. 2005. Who Benefits from OTOP? Bangkok Post, 9 October 2005. p. 6 (Perspective). Bangkok.
- Kementerian Perindustrian. 2011. OVOP: Saling Dukung Produk Lokal IKM Indonesia Bersaing di Pasar Global. Gema Industri Kecil. Edisi XXXIII, Juni 2011. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian. Jakarta.
- Kementerian Perindustrian. 2010a. Pedoman Umum Pengembangan IKM Melalui OVOP. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian. Jakarta.
- Kementerian Perindustrian. 2010b. Pedoman Pengembangan IKM Melalui Kemitraan Usaha. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian. Jakarta.
- Kustiari, R., H. P. Saliem, S. M. Pasaribu, B. Sayaka, dan E. Suryani. 2010. Akselerasi Sistem Inovasi Teknologi Pengolahan Hasil dan Alsintan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Laporan Teknis. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Ministry of Interior. 2004. OTOP Story of Product Record 2004: Local Wisdom Pride, The Product of Thailand. Community Development Department, Ministry of Interior. Bangkok.
- Media Indonesia. 2009. One Village One Product Menjadi Gerakan Nasional. Harian Media Indonesia Edisi 16 November 2009. Jakarta.
- Norton, R. D. 2004. Agricultural Development Policy: Concepts and Experiences. John Wiley & Sons Ltd. West Sussex, England. pp. 468-469.
- Pasaribu, S.M. 2008. Developing of Small and Medium Enterprises for Poverty Alleviation in Indonesia: Lesson Learned from OTOP Program in Thailand. Agricultural Policy Analysis Volume 5 No. 1 (53-71).
- Pongquan, S. 2005. The National Database for Rural Development in Thailand. Makalah disampaikan pada Study Visit of Indonesian Officials on "Development Planning for Planners", Bangkok, 4-10 December 2004. RRDP/SERD, Asian Institute of Technology. Bangkok.
- Samar, E. D. 2010. Revisiting the SMEs in the Philippines: Challenges and Issues. *dalam* Rusastra I W., H. P. Saliem, S.H. Susilowati, R. N. Suhaeti. H. J. Purba, dan Wahida (Eds.): The Role of SMEs on Poor Power Empowerment: Lesson Learned and Sharing Experiences. Proceedings of a Workshop, Bali, Indonesia, October 28-30, 2009. APEC-ATCWG Agricultural Technical Cooperation Working Group Workshop (ATC 09/2009 A). ICASEPS. Bogor. pp. 179-193.
- Saptana, E. Ariningsih, S.K. Darmorejo, S. Wahyuni, dan V. Darwis. 2005. Kebijakan Pengembangan Hortikultura di Kawasan Agribisnis Hortikultura Sumatra Utara (KAHS). AKP Volume 3 No. 1 (51-67).
- Soemarno. 2007. Konsep Pengembangan Kawasan Agribisnis Komoditi Unggulan Wilayah. [http://soemarno.multiply.com/journal/item/7/PENGEMBANGAN\\_KAWASAN\\_AGRIBISNIS\\_KOMODITI\\_UNGgulan](http://soemarno.multiply.com/journal/item/7/PENGEMBANGAN_KAWASAN_AGRIBISNIS_KOMODITI_UNGgulan). 18 Agustus 2011.